



Buletin Parlementaria



3 Pesan Damai
untuk
Palestina



4 Pertanyakan OJK
yang Wajibkan
Asuransi Ranmor



Bali Harus
Jadi Contoh
Netralitas



Apresiasi
Kodam IV,
Siap Jaga
Keamanan
Pilkada

Nomor 1304/I/VIII/2024 Agustus 2024



9 772614 339005



Jelang Pilkada, Pengamanan Harus Terlaksana

Jelang Pilkada, Pengamanan Harus Terlaksana



FOTO: PDT

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz bersama tim mengunjungi Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Selasa 16/7/2024

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa salah satu tantangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ialah kekerasan politik. Maka ia menekankan pentingnya pengawasan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia untuk mencegahnya.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi di seluruh daerah, dari kabupaten hingga kota. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan terhadap Kodam diperlukan," tegas Legislator Dapil Sumut I tersebut saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/7).

Menurutnya, peran TNI sangat penting dalam mengantisipasi hal

yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Kresna Dewanata mengungkapkan keyakinannya

terhadap kelancaran Pilkada serentak yang akan segera diadakan. Menurutnya, meskipun ini adalah pengalaman pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya telah menjelaskan bahwa langkah-langkah antisipatif telah disiapkan.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menambahkan bahwa suksesnya Pemilu Presiden dan Legislatif sebelumnya menjadi bukti akan kesiapan sistem dalam menghadapi tantangan serupa. "Dengan pemaparan yang telah kami terima, kami yakin bahwa Kodam Brawijaya dapat mempertahankan dan menjadi contoh bagi Kodam di daerah lain," lanjutnya.

Untuk itu, Komisi I berkomitmen untuk terus mendukung Kodam Brawijaya dalam menjaga keamanan dan kesuksesan Pilkada serentak. Serta memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan adil bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. — pdt/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Pesan Damai untuk Palestina



FOTO - JKAPDPT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima kunjungan Imam Besar Al-Azhar Mesir, Mohamed Ahmed Al-Tayeb di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Imam Besar (Grand Sheikh) Al-Azhar Republik Arab Mesir, Mohamed Ahmed Al-Tayeb ke Gedung DPR. Dalam pertemuan bilateral itu, Puan dan Imam Besar Ahmed berbicara mengenai sejumlah isu, mulai dari nilai toleransi, perempuan dalam politik, hingga dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

Imam Besar Ahmed hadir bersama sejumlah jajaran Universitas Al-Azhar Mesir. "Yang Mulia Grand Sheikh, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Yang

Mulia untuk dapat melakukan kunjungan ke DPR RI," kata Puan di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (11/7).

Ia kemudian menyinggung tentang situasi krisis di Gaza. Puan menyebut krisis di Jalur Gaza saat ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi dan mengajak Imam Besar Ahmed untuk bekerja sama demi perdamaian di Palestina.

"Kita harus memperkuat dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui cara damai dan negosiasi multilateral yang kredibel," tuturnya. **ssb/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danurtirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saurn, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balgeys Maeshyntha, Anju Alfonso Stimpul, Zutfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiatli, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Geraldi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widaywati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zutfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrissa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Pertanyakan OJK yang Wajibkan Asuransi Ranmor

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengkritik rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memberlakukan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor (ranmor) mulai tahun 2025.

"Ya (pemberlakukan asuransi wajib ranmor) tentu akan memberatkan. Sekarang saja beli motor sudah kena pajak, jalanan yang dilalui juga pajak, masak kendaraannya juga dibebani asuransi," katanya kepada **Parlementaria** di Jakarta, Kamis (18/7).

Politisi Fraksi PKB ini meminta OJK untuk tidak gegabah dalam membuat kebijakan. Jika memang perlu pemasukan, ia meminta OJK untuk menggunakan cara yang kreatif, dan tidak membebani masyarakat dengan asuransi.

Oleh karenanya, ia berharap agar Pemerintah dan OJK meninjau ulang rencana tersebut.

Alih-alih membebani masyarakat dengan asuransi kendaran bermotor dengan pihak lain, menurutnya pemerintah lebih baik mengoptimalkan asuransi Jasa Raharja yang sudah ada.

"Kita kan sudah punya Jasa Raharja. Kenapa tidak pakai itu saja. Saya kira ketimbang pakai skema asuransi baru dan menggunakan kelembagaan baru, mending itu

(Jasa Raharja) dioptimalkan," tukas Gus Muhaimin, begitu Muhaimin biasa disapa.

Untuk diketahui, sebelumnya OJK menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). — **ayu/rdn**

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.



FOTO : IST/PDT

Bali Harus Jadi Contoh Netralitas



FOTO: BLF/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali.

mereka akan netral sudah dilihat dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, Kasad, maupun Panglima Kodam sendiri. Perihal langkahnya, apa tadi sudah dipaparkan dipresentasikan. Kita melihat kesiapan itu betul-betul sudah siap,” ujar Utut dalam Kunjungan Kerja Reses ke Kodam IX Udayana, Bali pada Selasa (16/7).

Pernyataan Panglima TNI soal netralitas tersebut ditunggu realisasinya. Ia pun berharap Pilkada 2024 mendatang tidak ada masalah yang berarti dan akan menjadi pesta demokrasi yang merepresentasikan pilihan rakyat sesungguhnya.

Sehingga, proses Pilkada 2024 dapat berlangsung secara jujur, adil, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung terciptanya demokrasi yang sehat di Indonesia.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan harapannya agar Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Menurutnya, Bali yang dikenal sebagai etalase Indonesia dengan keanekaragaman turis dan penduduk multi-etnis, harus bisa menunjukkan netralitas dan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada. **blf/rdn**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menekankan pentingnya netralitas TNI, khususnya menjelang Pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Utut. Ia menekankan bahwa netralitas TNI sudah menjadi komitmen yang disampaikan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), maupun Panglima Kodam IX Udayana.

“Kodam (Udayana) ini meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kesiapan bahwa



Scan QR untuk berita selengkapnya



Apresiasi Kodam IV, Siap Jaga Keamanan Pilkada

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan bahwa Kodam VI/Mulawarman telah siap dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, harus ada sinergi dan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga terkait, guna mencegah kerawanan dan ancaman, baik militer maupun non militer.

“Kesiapan Kodam VI/Mulawarman berupa operasi intelijen, operasi teritorial dan juga operasi informasi kepada Pemda sudah dipersiapkan dengan matang. Sinergitas TNI mengacu pada kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti KPU dan Kepolisian, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang aman, lancar, dan demokratis,” ujarnya usai ditemui di Kodam IV/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/7).



FOTO: DIP/PIPT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin kunjungan kerja reses di Kodam IV/Mulawarman, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (17/07/2024).

Lebih lanjut, ia mengapresiasi strategi perencanaan Pilkada yang sudah dilakukan oleh Kodam IV/Mulawarman. “Seperti melakukan pemetaan daerah rawan konflik,

perbantuan distribusi logistik pemilu, optimalisasi peran satkowl, dan memaksimalkan perbantuan pengamanan pemilu,” tutur Politisi Fraksi PKS ini.

Berkenaan dengan strategi yang telah direncanakan ini, ia berharap agar nantinya dapat terciptanya tatanan nilai, norma dan etika dalam proses kehidupan berdemokrasi pada perhelatan Pilkada 2024 di Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara memang harus menjadi perhatian ekstra. Tidak hanya dari peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu, melainkan juga TNI yang mana sesuai tupoksinya agar tingkat kerawanan tetap kondusif dan aman. **dip/rdn**

IA BERHARAP AGAR NANTINYA DAPAT TERCIPTANYA TATANAN NILAI, NORMA DAN ETIKA DALAM PROSES KEHIDUPAN BERDEMOKRASI PADA PERHELATAN PILKADA 2024

Abdul Kharis Almasyhari

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

'Role Model' bagi Kantah Daerah Lainnya



FOTO: SRW/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta di sela Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Bali, Kamis (18/7/2024).

model nasional, khususnya yang berkaitan dengan setiap desa di kabupaten Badung ada buku tanah," katanya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Bali, Kamis (18/7).

Namun demikian, ia mengakui bahwa tidak semua Kantah di tiap-tiap daerah memiliki pelayanan yang cepat dan baik. Masih terdapat oknum aparat yang bermain dan menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh legalitas dari kepemilikan maupun perpanjangan hak guna lahan bangunan.

Lebih lanjut, ia membeberkan sejumlah kasus konflik pertanahan di tanah kelahirannya di Yogyakarta. "Sudah ada lima kepala desa yang masuk (penjara), khususnya yang (berkaitan dengan kasus) di belakang Ambarukmo, Sewon, Banguntapan. Itu memang terlalu banyak mafia. Dan di situ ada juga oknum aparat yang bermain. Ini kondisi yang dihadapi oleh kawan-kawan di daerah," jelasnya. — **srw/rdn**

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengapresiasi kinerja pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah) Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Badung, Bali. Ia menyebut berbagai program penanganan dan pelayanan reforma agraria di Badung yang berpihak pada rakyat harus bisa menjadi *role model* bagi Kantah di daerah lainnya, khususnya, untuk mengurangi konflik berkaitan dengan pertanahan.

"Saya merasa senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPR khususnya Kantah Badung. Saya juga berharap agar kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kantah Badung itu dapat menjadi role



Scan QR untuk berita selengkapnya



Hindari Praktik Pinjam-Nama Pembelian Tanah



FOTO: TRA/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra dalam Kunker Reses Komisi II DPR RI ke Kota Denpasar, Bali, Kamis (18/7/2024).

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra mengimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bali untuk menghindari pelanggaran hukum dari praktik *nominee*. Praktik *nominee* merupakan perjanjian pinjam-nama oleh Warga Negara Asing (WNA) kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat sebuah usaha. Praktik ini marak terjadi, khususnya di Provinsi Bali.

Karena itu, secara tegas, ia turut mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Bali, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Saya mengajak masyarakat Bali khususnya berhentilah menjadi *nominee*. Jadilah tuan di rumah sendiri. Agar kedepannya tidak ada lagi pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah, praktik *nominee*

tidak boleh lagi dilakukan di tanah air ini," jelas Bagus Adhi dalam Kunker Reses Komisi II DPR RI ke Kota Denpasar, Bali, Kamis (18/7).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar itu turut mendorong kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terus dapat mensosialisasikan secara masif memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, terkait dampak pelanggaran hukum yang dapat ditimbulkan dalam praktik *nominee* khususnya di Bali. Menurutnya, masih banyak upaya yang sah dan legitimate yang dapat ditempuh di dalam hal kepemilikan tanah.

"Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama dengan tujuan kita dalam upaya memberantas praktik *nominee* di tanah air. Karena praktik ini sudah puluhan tahun terjadi tentu ini perlu upaya dan kerja keras yang lebih besar bagi BPN," harap Bagus Adhi.

— tra/rdn



SAYA MENGAJAK MASYARAKAT BALI KHUSUSNYA BERHENTILAH MENJADI *NOMINEE*. JADILAH TUAN DI RUMAH SENDIRI. AGAR KEDEPANNYA TIDAK ADA LAGI PELANGGARAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH, PRAKTIK *NOMINEE* TIDAK BOLEH LAGI DILAKUKAN DI TANAH AIR INI

Anggota Komisi II DPR RI

Bagus Adhi Mahendra Putra

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rehabilitasi, Solusi Atasi Penyalahgunaan Narkoba



FOTO : AHA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam kunjungan kerja reses di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (15/7/2024).

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyebutkan banyak negara yang memenjarakan pengguna akhirnya kewalahan dengan tidak memadainya kapasitas tahanan lapas, seperti juga Indonesia. Maka itu, ia mencontohkan keberhasilan Portugal dengan membedakan perlakuan antara pengguna narkoba dengan bandar atau pengedarnya.

“Di Portugal setelah dicoba, ternyata jalan. Cuma memang harus konsisten bahwa bandar harus dihukum berat. Tapi untuk

pengguna, sebenarnya mereka itu korban, jadi harus direhabilitasi,” ujar I Wayan saat ditemui dalam kunjungan kerja reses di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (15/7).

Dalam kunjungan tersebut terdapat pertemuan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) perwakilan provinsi setempat. Di kesempatan itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyampaikan bahwa persyaratan untuk rehabilitasi pengguna narkoba di negara ini masih rumit. Untuk itu perlu terobosan dan jadi perhatian BNN.

Salah penanganan atas pengguna, menurut I Wayan membuat jumlah pemakai narkoba sulit berkurang, alih-alih semakin meningkat. “Malah bertambah dan jadi beban negara sebab mereka dijadikan sebagai tahanan narkoba. Kadang lapas yang kami temui, hampir separuhnya narapidana narkoba,” urainya.

Untuk memulai penggalakan program rehabilitasi ini, ia akui memang tidak mudah. Perlu kemauan politik yang kuat agar lahir kebijakan yang tegas dengan pengawasan yang ketat pula. **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Maksimalkan Cetak Sawah Baru di Sulawesi Barat

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, mengungkapkan rencana besar untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong di Sulawesi Barat, guna mencapai target nasional peretakan sawah baru seluas 1 juta hektar. Menurutnya, Sulawesi Barat diharapkan dapat berkontribusi sekitar 10.000 hektar dalam program ini.

"Kira-kira nasional target 1 juta hektar, di Sulbar ini kita berharap bisa 10.000 hektar. Saya kira memang harus dibuka daerah-daerah lahan-lahan yang

ada potensi air itu dibuatkan salurannya, dibuatkan jalan taninya sehingga bisa ditanami. Intinya bagaimana lahan yang ada ini bisa dimaksimalkan untuk penanaman," jelas Andi Akmal Pasluddin kepada saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV, di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (17/7).

Pernyataan ini sejalan dengan Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, yang juga menegaskan pentingnya alokasi lahan untuk cetak sawah baru di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat.

"Kita sepakati tadi untuk peretakan sawah baru itu sekitar

10.000 hektar, untuk kita alokasikan di 5 sampai 6 Kabupaten. Saya kira itu akan terpenuhi bahkan masih kurang. Saya kira di Mamuju ini juga yang kita tempati ini banyak lahan-lahan yang memenuhi target 3 juta hektar itu," ujar Suhardi Duka.

Komitmen dari kedua anggota DPR ini menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui optimalisasi lahan-lahan potensial. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Barat dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada. — skr/rdn



FOTO: SKR/AHA

Komis IV DPR RI Saat berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (17/7/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kembangkan Sentra Hilirisasi Produk Perikanan

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk mengembangkan sentra hilirisasi produk perikanan. Salah satunya Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kota Pekanbaru, Riau, yakni CV Tiga Caneca.

“Saya melihatnya sangat senang hati dan memberikan apresiasi kepada UPI Tiga Caneca. Seharusnya Pemda dapat mengembangkan sentra-sentra hilirisasi yang seperti ini karena ini memiliki nilai tambah yang baik,” ungkap Sudin usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di unit pengolahan ikan (UPI) Tiga Caneca di Pekanbaru, Riau, Selasa (16/7).

Untuk diketahui, Usaha



FOTO: HNM/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di unit pengolahan ikan (UPI) Tiga Caneca di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (16/07/2024).

Pengolahan Ikan (UPI) Tiga Caneca merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang pengolahan ikan patin hidup dengan hasil produk Fillet Patin Beku. UPI Tiga Caneca juga mengupayakan merek ‘Filet Sumodori’ sebagai produk lokal unggulan di Pekanbaru Riau

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk mendorong dan mendukung unit pengolahan ikan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang serta membangkitkan industri perikanan. Baik melalui pemberian kemudahan perizinan, kemudahan pembinaan, sertifikasi, hingga akses pasar yang lebih luas lagi,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebab, melihat faktanya, Indonesia dikenal dengan potensi sumberdaya ikan yang begitu melimpah. Diketahui bahwa produksi ikan Indonesia masuk kedalam lima besar penghasil produk kelautan dan perikanan di dunia. **hnm/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



KENDARAAN BERMOTOR WAJIB IKUT ASURANSI

OJK mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia ikut asuransi TPL (Third Party Liability) Per Januari 2025

Pengguna kendaraan bermotor di Indonesia termasuk besar, 141,99 Juta Unit pada 2021. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada tahun 2021 baru mencapai 3,18 persen.



Dr. Suryadi Jaya Purna, S. T.
Anggota Komisi V DPR RI

"Kendaraan bermotor wajib asuransi ini perlu ditolak," kata Suryadi

Tentang TPL (*Third Party liability*)

Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya secara finansial, jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan.



Untuk harga, tergantung jumlah peserta, semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib tersebut, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah.



Sumber: Berbagai Sumber

Apresiasi Kinerja Bumdes di Tabanan

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sarining Winangun Kukuh di Provinsi Bali atas sejumlah prestasinya dalam mengelola Bumdes tersebut. Pasalnya, Bumdes ini hanya mengelola sawah 103 ha di Provinsi Bali tetapi mampu menyuplai kebutuhan beras di beberapa Kabupaten.

“Kami berterima kasih dan memberi apresiasi kepada kementerian desa yang telah membina Bumdes ini, sehingga dia berhasil seperti ini. Nah, oleh karena itu tadi ada bantuan modal senilai Rp75 juta dari Kementerian Desa PDTT, mudah-mudahan juga dapat dikelola dengan baik,” ujar Ridwan saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi V DPR mengunjungi BUM



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae saat mengunjungi BUM Desa Sarining Winangun Kukuh di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Jum'at (12/7/2024).

Desa Sarining Winangun Kukuh di Tabanan, Bali, Jum'at (12/7).

Adapun, lanjut Politisi F-Partai Golkar ini, ada sejumlah persoalan yang dihadapi mereka seperti minimnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta beban perpajakan yang terlalu tinggi untuk BUMDes yang omsetnya belum terlalu besar.

“Untuk kualitas SDM sendiri nantinya dari Kemendes PDTT akan melakukan pembinaan dengan baik, kemudian persoalan belum memiliki kantor dan gudang usaha juga akan dicoba dibantu oleh kementerian terkait,” ucap Ridwan.

Yang paling menarik, kata Ridwan, adalah persoalan pajak, mereka merasa berat dengan besaran angka 5 persen yang dibebankan kepada Bumdes, padahal bisa dibilang omsetnya belum terlalu besar. **jka/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Pantau Proyek Renovasi Istana Tampaksiring



FOTO: SHN/PDT

Komis V DPR RI saat meninjau proyek renovasi Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali.

Komis V DPR RI memantau proyek renovasi Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali. Renovasi ini telah dilakukan sejak Desember tahun 2023 lalu, dan masih dalam proses perbaikan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mengatakan bahwa renovasi ini adalah bagian dari upaya menjaga kelestarian aset negara.

"Ini adalah aset negara dan ini simbol-simbol kenegaraan kita ya kan, presiden kan simbol negara dan ini (istana presiden) adalah bagian dari itu ya kan," jelas Roberth usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Istana Kepresidenan Tampaksiring, Gianyar, Bali, Jumat (12/7).

Ia juga menjelaskan bahwa fokus dari renovasi bangunan ini selain

membenahi beberapa bangunan yang ambruk akibat lapuknya usia, juga membenahi aliran listrik agar tidak menimbulkan korsleting. Sehingga fokus renovasi tidak hanya yang tampak dari luar, tetapi juga bagian dalam bangunan.

"Karena renovasi yang kami lihat ini kan bukan pembangunan baru ya kan, lebih di titik beratkan untuk atap dan instalasi listrik, karena instalasi listrik ini kan perlu sekali untuk mendapat perhatian khusus karena

hampir sudah sekian puluh tahun lamanya, ditakutkan terjadi korslet dan terbakar. Kalau (atapnya) kita lihat tadi dia pakai siring, supaya kelihatan keasliannya, dan tidak ada yang diubah," tambahnya.

Roberth juga mendorong agar PUPR bisa bekerja lebih keras. Sebab pengerjaan renovasi Istana Kepresidenan Tampaksiring ini telah dilakukan sejak Desember tahun lalu dan diharapkan segera rampung. **syn/aha**



RENOVASI YANG KAMI LIHAT INI KAN BUKAN PEMBANGUNAN BARU YA KAN, LEBIH DI TITIK BERATKAN UNTUK ATAP DAN INSTALASI LISTRIK

Robert Rouw

Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pelayanan Bandara Ngurah Rai Harus Ditingkatkan



FOTO: GYS/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, melakukan tinjauan lapangan langsung di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (12/7/2024).

Dalam kunjungan kerja ke Bandara Ngurah Rai Bali, Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan dan fasilitas di bandara yang kian padat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyadari bahwa bandara ini semakin ramai wisatawan, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih

baik untuk menjaga kenyamanan dan kepuasan penumpang.

“Bandara Ngurah Rai Bali kini semakin padat dengan arus penumpang yang terus meningkat. Sebagai destinasi favorit, bandara ini harus dikelola dengan standar tinggi untuk memastikan para penumpang dapat menikmati layanan yang maksimal,” terang Andi Iwan Aras usai melakukan

tinjauan lapangan langsung di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (12/7).

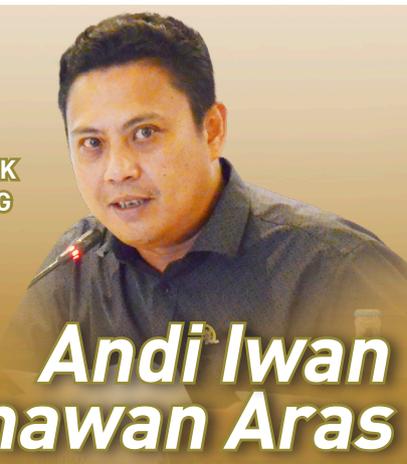
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa standar tinggi dalam pengelolaan bandara harus diterapkan. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemudahan dalam proses *check-in*, keamanan yang lebih baik, hingga penyediaan fasilitas pendukung yang nyaman dan bersih. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang, sehingga mereka bisa menikmati layanan yang maksimal.

“Kami ingin para penumpang merasakan kenyamanan dan kemudahan sejak mereka tiba di bandara. Ini termasuk kemudahan dalam proses *check-in*, keamanan, serta fasilitas pendukung seperti area tunggu yang nyaman dan bersih.” ujar Andi Iwan Aras.

gys/aha



SEBAGAI DESTINASI FAVORIT, BANDARA INI HARUS DIKELOLA DENGAN STANDAR TINGGI UNTUK MEMASTIKAN PARA PENUMPANG DAPAT MENIKMATI LAYANAN YANG MAKSIMAL



Andi Iwan Darmawan Aras

Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ratifikasi Persetujuan Preferensi Perdagangan RI-Iran



FOTO: GER/DT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dilakukan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Komisi VI DPR RI menyetujui untuk meratifikasi Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Iran. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dilakukan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

"Komisi VI DPR RI menyetujui pembahasan terhadap pengesahan persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres)," ujar Wakil

Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat membacakan hasil kesimpulan rapat.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga meminta Kementerian

Perdagangan untuk dapat memperhatikan aspek geopolitik, hambatan bersifat tarif dan non tarif, serta besaran pasar kedua belah pihak di dalam Perjanjian Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimis Ratifikasi Preferensi Perdagangan Indonesia-Iran ini akan membawa dampak positif terhadap kedua negara. Perjanjian ini akan meningkatkan ekspor dan berpeluang meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia.

Melalui persetujuan ini, Indonesia mendapatkan penghapusan dan penurunan tarif atas 239 pos tarif (PT). Post tarif ini meliputi produk mineral, industri, pertanian dan perikanan. Setelah diberlakukan ekspor Indonesia ke Iran diproyeksikan menjadi USD 494 juta pada 20230 dan menikmati surplus sebesar USD 468 juta. ➡

gal/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



PNM untuk BUMN Karya Masih Didalami

Komisi VI DPR RI memanggil Direktur Utama dari beberapa BUMN Karya. Di antaranya adalah Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTTP), serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Pemanggilan ini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, pengajuan PMN 2025 untuk BUMN karya merupakan tindak lanjut dari rapat kerja (raker) antara Komisi VI bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024 kemarin.

Permintaan PMN masih dalam tahap pendalaman dan akan dibahas kembali bersama Kementerian BUMN selaku pemegang saham



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI guna membahas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2024).

perseroan, sebelum disepakati bersama pada pekan ini. "Mengacu pada hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN tanggal 7 Juni 2024 terdapat usulan PMN tahun 2025," ujar Martin Manurung

di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Berikut daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025. Pengajuan suntikan dana segar ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI. Pertama, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 13,86 triliun;

Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Rp 2,96 triliun; Ketiga, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) Rp 2 triliun; Keempat, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) Rp 1,56 triliun; Kelima, Perum Perumnas Rp 1 triliun. Dengan demikian total pengajuan PMN untuk BUMN karya mencapai Rp 21,38 triliun.

— **ssb/rdn**



**PENGAJUAN PMN 2025
UNTUK BUMN KARYA
MERUPAKAN TINDAK
LANJUT DARI RAPAT KERJA
BERSAMA MENTERI BUMN
ERICK THOHIR**



Martin Manurung

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Penguatan Industri Nasional, Turunan Produksi Smelter Tembaga



FOTO: AFR/PTI
MURYADI
V. ST.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dengan PTFI, Pemprov Jatim, serta Pemkab Gresik, ke Gresik, Jawa Timur, Rabu (17/7/2024).

yang baik, mengingat proses pembangunan ini sempat terhenti karena Covid-19, tetapi bisa dilanjutkan dan sekarang kita sudah melihat realisasinya. Tinggal kita melihat pada saat produksi peningkatan produksinya sampai dengan 100 persen. Itu pun *on the track*," kata Eddy Soeparno di Gresik, Jawa Timur, Rabu (17/7).

Eddy menjelaskan, tantangan terbesar dari smelter freeport saat ini tidak hanya bisa memproduksi hasil dari tambang tembaga kemudian melalui proses smelter. Namun, juga bagaimana hasil dari output smelter itu bisa kemudian diproses lagi secara lebih lanjut di industri dalam negeri.

"Industri dalam negeri inilah yang harus dikuatkan kemudian agar proses dan output yang dihasilkan oleh smelter Freeport bisa diolah lebih lanjut lagi di dalam negeri. Jadi tujuan kami adalah itu," jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Dengan kata lain, tahap pertama yang sudah ingin dicapai untuk memperoleh smelter yang berkapasitas besar untuk mengelola hasil dari Freeport itu sudah bisa dilaksanakan. Serta dalam waktu dekat ini, ia berharap bahwa industri turunannya juga dikembangkan dalam waktu cepat.

 afr/rdn

Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Gresik, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, progres dari pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) saat ini sudah mulai beroperasi dan produksinya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.

"Produksinya mulai bulan Agustus 2024 dan akan mencapai produksi 50 persen di bulan Desember 2024 mendatang. Ini merupakan suatu pencapaian



**INDUSTRI DALAM NEGERI
INILAH YANG HARUS
DIKUATKAN KEMUDIAN
AGAR PROSES DAN OUTPUT
YANG DIHASILKAN OLEH
SMELTER FREEPORT BISA
DIOLAH LEBIH LANJUT LAGI
DI DALAM NEGERI.**

Eddy Soeparno

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Smelter Tembaga Telah Penuhi Syarat TKDN

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai smelter tembaga yang diproduksi oleh PT Amman Mineral Industri (AMIN), anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN), berperan penting terhadap ekonomi Indonesia. Ia berharap keberadaan smelter dapat menambah nilai tambah barang tambang.

“Selama ini kita mengeksport konsentrat tembaga, dalam waktu dekat akan berupa katoda tembaga dengan kemurnian 99,99 persen. Bahkan ada proses produk turunannya yang lain, yakni berupa emas dan juga ada perak,” paparnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi VII di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (15/7).

Sugeng mengaku bersyukur karena Indonesia memiliki pertambangan AMMAN yang tata kelolanya jika dilihat sisi *Environment, Social, and Governance* (ESG) nya sangat prudent. Apalagi dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik fasilitas untuk pertambangan itu



FOTO: NDI/PT

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi VII di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (15/7/2024).

sendiri, maupun fasilitas pendukung lainnya untuk pengembangan wilayah tersebut, dari segi industri sampai dengan pengembangan wisata.

“Karena ada pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) 450 mw yang juga sedang dibangun oleh PT AMMAN, mereka juga mulai menerapkan tata cara manajemen dan penghitungan pengurangan emisi yang muncul dari aktivitas pertambangan,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Secara Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sugeng juga menilai smelter tembaga PT AMMAN ini sudah mencapai kurang lebih mencapai 46 persen. Angka tersebut di atas angka syarat minimal, yaitu 40 persen. Sugeng berharap semoga kedepannya smelter tembaga ini bisa meningkatkan TKDN lebih tinggi lagi. **ndy/rdn**



SELAMA INI KITA MENGEKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA, DALAM WAKTU DEKAT AKAN BERUPA KATODA TEMBAGA DENGAN KEMURNIAN 99,99 PERSEN.

Sugeng Suparwoto

Ketua Komisi VII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pertanyakan Peta Jalan Energi Hijau PLN Nusantara Power

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mendesak PT PLN Nusantara Power memberikan penjelasan secara rinci mengenai data dan peta jalan energi hijau (*green energy*) yang telah dilakukannya. Hal itu dalam upaya mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060.

“Kalau kita membicarakan tentang biomassa, maka kita harus tahu komponen-komponennya apa. Misalnya apakah sekam padi, cangkang sawit, atau kayu. Dan itu harus ada simulasinya,” tandas Andi Yuliani Paris dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII ke PLTU Paiton, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/7).

Dikatakannya, kalau misalnya di pembangkit-pembangkit kecil sudah 100 persen menggunakan biomassa tetapi sumbangan energinya hanya 10 persen dari kebutuhan, maka artinya pemenuhan 90 persen kebutuhan sisanya (masih) tetap memakai batu bara.



FOTO: DEP/RDI

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII ke PLTU Paiton, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/7/2024).

“Seharusnya kalau memang 100 persen biomassa, maka 100 persen biomassa itu betul betul menghasilkan energi 100 persen tanpa kita pakai lagi batu bara.

Jadi ini harus diseriusin. Bicara transisi energi menjadi energi hijau itu harus diseriusin. Jadi harus ada ukuran-ukurannya penggunaan teknologi tersebut,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.

Ia menambahkan, seharusnya PT PLN Nusantara Power, terlebih yang sudah bekerja sama dengan lembaga penelitian energi, harus mempunyai data yang jelas, misalnya terkait dengan berapa jumlah energi yang dihasilkan jika dicampuri dengan biomassa dengan ukuran tertentu. Hal itu bertujuan agar ada keberlanjutan dalam suplai produksi. [dep/rdn](#)



KALAU KITA MEMBICARAKAN TENTANG BIOMASSA, MAKA KITA HARUS TAHU KOMPONEN-KOMPONENNYA APA. MISALNYA APAKAH SEKAM PADI, CANGKANG SAWIT, ATAU KAYU. DAN ITU HARUS ADA SIMULASINYA

Andi Yuliani Paris

Ketua MKD DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: OJ/PTD

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (8/7/2024).

Banyak Mobil Pakai Plat DPR Palsu

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus mobil memakai plat DPR palsu. Sehingga diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI.

Politisi PKS ini menjelaskan fungsi MKDi. Pertama, pentingnya tugas MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan anggota DPR RI saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedua, ia menekankan bahwa kehadirannya bertujuan untuk

memberikan penegasan kepada aparat kepolisian, khususnya Direktorat Lalu Lintas, agar tidak ragu menindak penggunaan TNKB DPR RI palsu.

“Tetapi yang paling penting bahwa kehadiran kita pada siang hari ini adalah kita ingin memberikan penegasan agar jangan ada keragu-raguan dari anggota kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) apabila patut dicurigai melihat adanya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI,” kata Legislator Dapil DKI Jakarta III ini usai memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (8/7).

Lebih lanjut, Adang yang juga mantan Wakapolri tahun 2004 silam ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan TNKB palsu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dirinya menekankan bahwa hal ini tidak hanya merugikan anggota DPR RI secara langsung, tetapi juga mencoreng marwah lembaga DPR RI itu sendiri. **o/aha**



PENTINGNYA TUGAS MKD DPR RI DALAM MENJAGA KEHORMATAN ANGGOTA DPR RI SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI NYA.

Adang Daradjatun

Ketua MKD DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Penanaman Pohon di Sidang Pertama IPPP

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turut mengenang momen seremonial penanaman pohon oleh para delegasi Sidang Pertama IPPP pada 2018 silam. Menurutnya, tanaman yang telah tumbuh berkembang kini itu menandakan komitmen dan kontribusi konkret negara-negara Pasifik dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah perubahan iklim untuk kehidupan

yang berkelanjutan.

“Selain itu juga sebagai penanda jalinan ikatan batin dan persaudaraan yang kuat antara Indonesia dan Pasifik, yang semakin mengukuhkan relasi antara masyarakat Indonesia dan Pasifik,” ujar Indra Iskandar dalam wawancara kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (19/7).

Adapun dalam Sidang Kedua IPPP tahun ini pembangunan yang Inklusif menjadi tema bahasan,

sejalan dengan peningkatan konektivitas kawasan untuk kemakmuran bersama. Dengan latar belakang kondisi geografis yang serupa sebagai negara maritim dan kepulauan, serta nilai persaudaraan melanesia, Indonesia dan negara-negara Pasifik membangun kemitraan untuk bertumbuh bersama.

“Isu kelautan juga menjadi tema bahasan lainnya, menyikapi krisis iklim global, sehingga Indonesia maupun negara-negara Pasifik dapat mengoptimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Indra.

Ia berharap usai pelaksanaan Sidang Kedua IPPP, diharapkan terdapat kerja sama konkret yang telah terbangun antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik dapat semakin diperkuat.

— rdn



FOTO: FHN/PDT

Ilustrasi pohon yang di tanam oleh para delegasi Sidang Pertama IPPP pada 2018.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Partisipasi Akademisi dalam Perancangan UU



FOTO: RR/PDT

Kepala BK Setjen DPR RI, Inosentius Samsul fotot bersama usai menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara BK dengan Universitas Sumatera Utara (USU). Penandatanganan berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Selasa (23/7/2024).



Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara BK dengan Universitas Sumatera Utara (USU). Penandatanganan berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Selasa (23/7).

Kepala BK Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, menuturkan, bahwa langkah kerja sama tersebut terus dilakukan oleh BK dengan berbagai perguruan tinggi khususnya USU guna memastikan partisipasi akademisi selalu ada dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)

dan pengesahan Undang-Undang (UU) yang dilakukan oleh DPR RI.

“Saya secara kuantitatif mengatakan bahwa hasil dari kerjasama dengan perguruan tinggi ini sudah terlihat ketika banyaknya Rancangan Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR adalah hasil kerja naskah akademik,” ungkap Inosentius usai kegiatan penandatanganan MoU bersama Rektor Universitas Sumatera Utara, Muryanto Amin.

Selain penyusunan naskah akademik, adapun kerja sama

lainnya yang diwujudkan antara lain berupa penyelenggaraan penelitian dan riset bagi para mahasiswa USU, khususnya dalam rangka penulisan tesis maupun disertasi.

“Poin-poinnya pertama kerja sama dukungan untuk pembuatan naskah akademik di Badan Keahlian, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan lain misalnya magang dan riset, jadi kalau ada mahasiswa yang mau melakukan penelitian dalam rangka tesis maupun disertasi akan kami prioritaskan dan kita akan sangat *welcome*,” ujarnya.

rr/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



DOKUMENTER INVESTIGASI

AKSI DEWAN

I NYOMAN PARTA

TVP
PARLEMEN



BALI BANGKIT

"Implementasi UU Provinsi Bali"

MEIDI NUGROHO / EXECUTIVE PRODUCER |
ADRIANUS SEPTIANTO / PRODUCER | HERIHERYADI / LINE PRODUCER

SAKSIKAN HANYA DI

<http://tvrparlemen.dpr.go.id>

SCAN HERE

